



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Adisucipto No 50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon 08115656122 Laman www.perkim.kalbarprov.go.id Pos-el disperkim@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 115 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik setiap saat dalam hal ini daftar informasi publik;
 - b. bahwa dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka transparansi informasi publik yang dikuasai perlu disusun dalam suatu daftar informasi publik;
 - c. bahwa untuk menjamin daftar informasi publik memuat informasi yang baik dan kekinian, maka perlu dimutakhirkan penyusunannya secara berkala;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka Penetapan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 115);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 2. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalimantan Barat Nomor 13/Tahun/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta Penetapan Visi, misi, Moto dan Maklumat Pelayanan pada dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik pada dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik pada dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tersedia dan ditempatkan pada website Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal Agustus 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : / PERKIM / 2024

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2024

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Nama Informasi	Pejabat yang Menguasai/ Penanggung Jawab	Format yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalimantan Barat	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	Selama berlaku
2	Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	Selama berlaku
3	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	Selama berlaku
4	Profil Singkat Pejabat Struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	Selama berlaku
5	Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
6	Profil PPID Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	Selama berlaku
7	Visi dan Misi Pelayanan Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	Selama berlaku
8	Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
9	LAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun

No	Nama Informasi	Pejabat yang Menguasai/ Penanggung Jawab	Format yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
	Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Renja Monev dan Keuangan	Softcopy	
11	LPPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
12	Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	5 Tahun
13	Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
14	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
15	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
16	Data perumahan dilokasi rawan bencana	Kabid Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
17	Daftar rehabilitasi rumah korban bencana	Kabid Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
19	Data kawasan kumuh kewenangan provinsi	Kabid Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
21	Data RTLH sesuai kewenangan provinsi	Kabid Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
22	Daftar bantuan RTLH sesuai kewenangan provinsi	Kabid Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
25	Produk layanan publik dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	Selama berlaku

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO.	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	6	7
Untuk saat ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki jenis informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.				

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Nama Informasi	Pejabat yang Menguasai / Penanggung Jawab	Format yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
1	Leaflet Indonesia darurat narkoba	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	Selama berlaku
2	SOP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
3	Laporan LKPJ Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
4	Laporan LPDD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Renja Monev dan Keuangan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
5	Laporan PPID pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
6	Survey kepuasan masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
7	SOP pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	Kabid Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
8	SOP Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Kabid Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
9	SOP bantuan pembangunan PSU perumahan khusus atau pembangunan rumah khusus akibat relokasi bencana /program pemerintah provinsi	Kabid Perumahan	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
10	SOP Site Plan Kawasan kumuh kewenangan provinsi dinas perumahan rakyat dan	Kabid Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun

No	Nama Informasi	Pejabat yang Menguasai / Penanggung Jawab	Format yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
	kawasan permukiman prov kalbar			
11	SOP penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman dinas perumahan rakyat dan kawasan provinsi kalimantan barat	Kabid Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
12	SOP kawasan kumuh kewenangan provinsi dinas perumahan rakyat dan kawasan provinsi kalimantan barat	Kabid Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
13	SOP daftar pembangunan psu di kawasan kumuh kewenangan provinsi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi kalimantan barat	Kabid Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
14	SOP RTLH sesuai kewenangan provinsi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi kalimantan barat	Kabid Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
15	SOP PSU kawasan permukiman yang di laksanakan oleh provinsi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman provinsi kalimantan barat	Kabid Kawasan Permukiman	Hardcopy Softcopy	1 Tahun
16	SOP Bidang Pertanahan tentang Pengadaan Tanah	Kabid Pertanahan	Softcopy	1 Tahun
17	SOP penlok pembaharuan penlok Pengadaan Tanah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kabid Pertanahan	Softcopy	1 Tahun
18	sop Sangketa Tanah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.	Kabid Pertanahan	Softcopy	1 Tahun

No	Nama Informasi	Pejabat yang Menguasai / Penanggung Jawab	Format yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan
19	Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Softcopy	1 Tahun
20	Laporan harta kekayaan Aparatur negeri (LHKAN) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Kasubbag Umum, Aparatur dan Aset	Softcopy	1 Tahun

D. DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rincian Harga Penyusunan HPS	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b;</p> <p>b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>c. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p> <p>d. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>e. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</p> <p>f. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>		√	10 tahun
2.	Rincian Harga Penawaran Penyedia Pemenang Berkontrak	<p>a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 dan 3;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun</p>		√	5 tahun

		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
3.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	<p>a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b;</p> <p>b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>c. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p> <p>d. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>e. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;</p> <p>f. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	√		10 tahun
4.	Gambar Rencana	<p>a. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p>	√		Tertutup sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari pemegang cipta.
5.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	<p>a. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</p> <p>b. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;</p>	√		10 tahun

		<p>c. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>d. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p> <p>e. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>			
6.	Addendum Kontrak	<p>a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>d. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>		√	10 tahun

KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN,



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE